SEKOLAH RAKYAT: PILAR PEMERATAAN PENDIDIKAN MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA

Uswadin
Guru SMP Labschool Jakarta
Email: dinuswa15@gmail.com

Abstrak

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan alternatif yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang sulit mengakses pendidikan bermutu. Program ini sangat terkait dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam khususnya asta ke-4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas". Asta cita merupakan misi yang diusung Presiden dan Wapres untuk mewujudkan visi, yaitu *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*. Program sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga membina karakter, keterampilan hidup, dan solidaritas sosial. Sekolah rakyat memberikan kesempatan kepada rakyat yang pada posisi terendah untuk dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dan komprehensif untuk menyiapkan generasi berkualitas pada masa mendatang yang akan mengurangi kesenjangan soaial dalam menikmati layanan pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata dari pendidikan sebagai alat pembebasan dan pembangunan manusia. Diharapkan, dalam 10–20 tahun ke depan, program ini menjadi fondasi lahirnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Kata kunci **:** Sekolah Rakyat, Pendidikan Berkualitas, pembangunan sumber daya manusia, Generasi Emas Indonesia 2045, kesenjangan sosial.

Pendahuluan

Salah satu tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia oleh para pendiri negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan konstitusi negara kita. Ini berarti negara yang berdiri nantinya diharapkan memiliki warga negara atau warga bangsa yang cerdas, dan untuk mewujudkan tujuan itu tidak lain adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat Pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Setelah amandemen bunyi pasal semakin dipertegas dengan lebih jelas lagi, bahwa tidak hanya mendapat pengajaran saja, namun warga negara berhak mendapat pendidikan. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan adalah hak asasi dan instrumen utama pembangunan manusia (Sen, 1999). Namun, ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi tantangan di Indonesia. Dalam kenyataannya banyak masyarakat miskin yang termarjinalkan dan sulit untuk meraih pendidikan. Masyarakat ini masih berjuang untuk meraih kebutuhan primernya yang tidak mudah sehingga pendidikan sering dianggap sebagi kebutuhan sekunder bahkan tertier. Sehingga banyak anak-anak sekolah yang terpaksa tidak sekolah atau putus sekolah karena

alasan ekonomi. Wakil Menteri Sosial menyampaikan bahwa Korelasi rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kian besarnya potensi kemiskinan, Jabo mengatakan, juga tercatat dalam data Susenas dan BPS 2024, yaitu 76 persen keluarga di Indonesia mengakui anaknya putus sekolah lantaran alasan ekonomi. (Tempo.co 11-25) Merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, pemerintah berupaya menghadirkan pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin atau lemah, yaitu dengan menghadirkan sekolah rakyat. Sekolah Rakyat (bukan sekolah rakyat di masa penjajahan) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Dikelola oleh Kemensos, program ini menekankan pendekatan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Tujuan dan Filosofi Sekolah Rakyat

Sekolah rakyat sesungguhnya sama dengan sekolah yang sudah ada dimasyarakat seperti TK< SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta. Sekolah-sekolah ini umumnya berada di bawah naungan kementerian pendidikan dasar dan menengah (Kemdikdasmen) maupun sekolah-sekolah yang dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Namun sekolah rakyat ini tidak berada di bawah naungan dua kementerian tersebut, namun berada di bawah naungan kementerian sosial (Kemensos).

Sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui sekolah ini diharapkan keluarga miskin dapat memperoleh hak mendapat pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga keluarga miskin diharapkan memiliki masa depan yang cerah pada masa mendatang, karena akan muncul generasi yang berkualitas yang akan dapat memotong rantai kemiskinan pada akhirnya. Selain itu sekolah rakyat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan (Tilaar, 2002). Sebagaimana dalam salah satu sila Pancasila dasar negara, kita semuanya ingin dapat mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh

Rakyat Indonesia. Tidak mudah untuk mewujudkannya, namun kita harus tetap berupaya dan bekerjasama untuk mewujudkan hal ini. Tanpa kerja keras dan upaya yang dilakukan maka cita-cita sila kelima Pancasila hanya fatamorgana.

Sekolah rakyat diharapkan juga mampu untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan kemandirian (Freire, 1970). Karena masyarakat kecil sering kurang memiliki kesadaran kritis dan kemandirian karena adanya batas-batas kemampuan dan sekat-sekat kehidupan yang membatasi ruang gerak dan hidupnya. Sekolah rakyat mencoba menghadirkan solusi alternatif untuk bisa menumbuhkan kesadaran dan daya kritis tersebut dengan mengurangi dan menghilangkan sekat-sekat yang selama ini membelenggu masyarakat. Selanjutnya sekolah ini diharapkan menjadi katalisator transformasi sosial dan pendidikan inklusif. Pendidikan yang bermutu agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dari lapisan tertinggi sampai yang terendah.

Karakteristik dan Model Operasional

Karakteristik Sekolah Rakyat ini unik, karena dibina langsung oleh kemensos, dan bersifat sekolah berasrama atau *boarding school*. Di tahap awal, Sekolah Rakyat memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Namun, ke depan, Pemerintah rencananya akan membangun sekolah permanen di atas lahan minimal 8 hektare. Di atas lahan tersebut, satu sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa. (tirto.id 07/25). Pendidikan yang diselenggarakan adalah gratis dengan fasilitas asrama, makan, dan pembinaan karakter, sehingga orangtua atau masyarakat tidak perlu membayar atau membiaya sekolah anak-anaknya, bahkan siswa mendapat uang saku.

Karakteristik yang kedua adalah mengenai kurikulum yang digunkan, tentunya kurikulum nasional. Namun dalam pelaksanaannya kurikulum terintegrasi antara akademik, keterampilan hidup, dan nilai sosial. Kehidupan di asrama memungkinkan siswa mendapat pendidikan yang lebih lengkap dibandingkan dengan pendidikan sekolah biasa. Disini diharapkan siswa memperoleh pembelajaran yang utuh tidak hanya sekedar mengejar target kurikulum, namun

siswa juga mendapat pendidikan kecakapan hidup serta tradisi-tradisi baik yang dikembangkan di sekolah dengan sistem asrama. Pengembangan kepribadian dan kesalehan sosial serta penguatan keimanan dan ketakwaan sangat mudah untuk dilaksanakan bersama dengan pengasuh asrama yang sudah terlatih dan berdedikasi.

Sekolah ini menyasar anak-anak yang tidak terlayani oleh sekolah formal, sehingga dalam penerimaannya adalah dengan menggunakan data yang ada pada kementerian sosial serta tidak dibuka secara umum seperti sekolah pada umumnya. Apabila kelompok masyarakat ini bisa terjangkau dan terlayani dengan baik, maka akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada, namun memang untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia tidaklah mudah karena sangat besar dan luasnya negeri ini. Yang terpenting sekarang sudah dimulai dan perlu didukung agar tidak berhenti di tengah jalan, seiring gantinya kebijakan dan atau gantinya pemerintahan

Tantangan dan Risiko

Mewujudkan cita-cita mulia memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu kebijakan, dukungan dan *effort* yang kuat dari semua pihak termasuk masyarakat sendiri. Menyiapkan sekolah rakyat dengan skema asrama dimana seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah karena seluruh siswa gratis bahkan mendapat seluruh fasilitas seragam, buku dan segala peralatan penunjang lainnya. Hal ini yang menyebabkan biaya operasional pendidikan menjadi tinggi. Hal ini yang kadang mendapat sosrotan dari masyarakat, sebab pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah pendidikan, khususnya pendidikan di daerah terpencil dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terkait dengan sarana prasarana serta kompetensi guru yang memadai, termasuk adalah memberikan kesejahteraan bagi para guru.

Namun jika pemerintah bertekad kuat menyelenggarakan pendidikan di sekolah rakyat ini maka perhatian dan kebijakan harus senantiasa dicurahkan. Disamping itu dengan segala kebijakan dan kewenangannya pemerintah tetap

memperhatikan sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan pedesaan agar sekolah-sekolah tersebut juga dapat maju dan berkembang seperti yang diharapkan. Jika hal ini dapat berjalan seiring dan sejalan maka akan mempercepat susksesnya pelaksanaan pendidikan di Indonesia, namun jika tidak ini akan menimbulkan masalah baru dalam pendidikan.

Masyarakat Indonesia sangat mengharapkan terjadi kesetaraan dalam pendidikan baik negeri maupun maupun swasta, baik di kota maupun di desa. Karena selama ini masih terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara desa dan kota dan antara negeri dan swasta. Banyak sekolah sekolah swasta yang berjalan asal jalan dengan keterbatasan sarana, prasarana serta kesejahteraan guru yang minim, walaupun dalam beberapa kondisi ada beberapa sekolah swasta yang memiliki kualitas unggul dan melebihi sekolah negeri, namun sekolah model seperti ini sangat jarang dan sedikit jumlahnya. Umumnya sekolah swasta dalam kondisi tertinggal dalam segala aspeknya. Agar tercipta keadilan dalam pendidikan, maka kebijakan pendidikan agar dapat menyentuh hal-hal demikian. Sekolah rakyat merupakan salah satu bentuk terobosan dan sekaligus inovasi dari pemerintah dengan menggunakan cara *shortcut* langsung menyentuh dari lapisan bawah tanpa birokrasi yang berbelit dengan niat mulia meningkatkan martabat dan harkat bangsa, khususnya masyarakat miskin dan terbelakang. Sekolah yang berniat mengangkat harkat dan martabat ini memerlukan sosialisasi yang masif dan merata ke seluruh rakyat sehingga tidak terjadi salah persepsi maupun perbedaan pandangan, sebab sebaik apapun program jika tidak disampaikan secara tepat sering mengalami kegagalan. Koordinasi lintas departemen dengan dukungan politik dari legislatif dan pendanaan yang terjaga akan memungkonkan keberlanjutan sekolah ini, disamping mempersiapkan sumberdaya pengelola dan pendidik-pendidiknya yang memenuhi kompetensi dan profesional penuh pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kesimpulan

Peran negara dan pemerintah serta masyarakat sangat mempengaruhi sukses pendidikan. Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo harus benar-benar memberi manfaat dan dampak yang nyata sehingga keberadaannya tidak hanya diterima namun ditunggu disegala tempat oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan transformatif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi lahirnya Generasi Emas Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan.

Sekolah Rakyat adalah manifestasi nyata dari pendidikan sebagai alat keadilan sosial. Meski dikelola di luar sistem pendidikan formal, program ini memiliki potensi besar untuk menciptakan transformasi sosial dan generasi unggul. Dengan penguatan sistemik dan kolaborasi lintas sektor, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.

Daftar Pustaka

1. Tilaar, H. A. R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
2. Fattah, N. 2004. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
3. Suyanto, S., & Jihad, A. 2013. *Revolusi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
4. UNESCO. 2015. *Education for All Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO Publishing.
5. Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
6. https://www.tempo.co/politik/64-persen-anak-dari-keluarga-miskin-akan-tetap-miskin-pada-masa-depan-2079445
7. https://tirto.id/daftar-sekolah-rakyat-di-jakarta-alamat-dan-daftar-fasilitasnya-heqw
8. https://tirto.id/wamensos-biaya-sekolah-rakyat-capai-rp48-juta-per-siswa-setahun-hdue